

## PERSEPSI WARGA SEKOLAH DAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN TINGKAT SMA NEGERI DI KABUPATEN NIAS BARAT (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe)

Eksaudi Bakti Hia\*, R. Hamdani Harahap\*\*, Delvian\*\*

\*Mahasiswa Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU

\*\*Dosen Fakultas Teknik Lingkungan USU

### ABSTRAK

Sekolah yang berwawasan lingkungan tidak hanya dalam arti fisik tetapi juga pola pikir serta kepedulian dan tindakan warga sekolah terhadap lingkungannya. Program sekolah berwawasan lingkungan adalah pemahaman dan kesadaran warga sekolah akan lingkungan sehingga apa yang dilakukan disekolah terbawa sampai akhir hayat. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat juga mencerminkan keberadaan warga sekolah yang ada mulai dari siswa, guru, staf, karyawan, unsur pimpinan sekolah bahkan sampai orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi warga sekolah terhadap sekolah berwawasan lingkungan dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh stakeholder Dinas terkait di Nias Barat dalam mengimplementasikan sekolah berwawasan lingkungan. Dengan metodologi deskriptif, penelitian ini dilakukan di SMA yang terdapat di Kabupaten Nias Barat yaitu SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe. Interpretasi dilakukan dengan uji statistik uji beda Mann-Whitney U guna mencari perbedaan persepsi SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa persepsi warga sekolah antara SMA Negeri 1 Sirombu cenderung lebih baik dibandingkan dengan SMA Negeri 2 Mandrehe terhadap sekolah berwawasan lingkungan dan belum ada upaya/tindakan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terkait dengan sekolah berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci :** Persepsi, Sekolah Berwawasan Lingkungan, Sekolah Adiwiyata, Pendidikan Lingkungan Hidup

### PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup dewasa ini adalah sifat, hakekat perilaku manusia dan etika terhadap lingkungan hidup. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup adalah akibat perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan mulai dari skala kecil misalnya membuang sampah sembarangan sampai pada skala besar dalam bentuk pencemaran air, udara dan tanah oleh industri pengelolaan, transportasi, rumah sakit dan perhotelan serta perusakan hutan yang mengganggu tata air oleh kegiatan usaha sektor kehutanan.

Menurut Daryanto dan Suprihatin (2013), permasalahan lingkungan hidup saat ini terjadi tidak lain akibat dari tindakan atau ulah manusia itu sendiri yang mana manusia tidak pernah merasa puas dalam hal memenuhi kebutuhannya sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Tindakan ini apabila dilakukan secara kontinu maka berdampak pada lingkungan.

Perilaku warga sekolah yang tidak berwawasan lingkungan seperti pemakaian air bersih secara berlebihan, membuang sampah disembarangan tempat, lingkungan sekolah yang gersang tanpa tumbuhan, pengadaan dan pembangunan baik sarana maupun prasarana sering mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Fenomena perilaku manusia itu sangat erat kaitannya dengan metode penyelenggaraan pendidikan lingkungan yang hanya sampai pada kognitif saja dan belum

sampai menyentuh tingkat afektif (kesadaran) dan psikomotorik (perbuatan) yang membuat warga benar – benar memaknai dan mau berbuat untuk memelihara lingkungan, tidak mencemari, tidak merusak dan mencegah segala perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan sekitar.

Hasanah (2011) menyatakan setidaknya manusia berkewajiban untuk menyelamatkan lingkungan sebagai antisipasi memperlambat laju peningkatan suhu bumi, upaya yang harus segera dilakukan salah satunya melalui proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan.

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : untuk menganalisis persepsi warga sekolah terhadap sekolah berwawasan lingkungan di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe di Kabupaten Nias Barat dan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholder* dinas terkait dalam mengimplementasikan sekolah berwawasan lingkungan Kabupaten Nias Barat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nias Barat, ada 2 sekolah yang dijadikan sampel penelitian yakni SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2

Mandrehe. Penelitian (survey lapangan, data sekunder, dan wawancara narasumber) dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai Januari 2017.

#### Metode Analisis Data

Untuk analisis perbandingan persepsi warga sekolah kita menggunakan uji beda (Muluk dan Ricky S, 2016) dengan rumus sebagai berikut :

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - \sum_{i=n_1+1}^{n_2} R_i$$

Keterangan : U = Nilai uji Mann-Whitney

N<sub>1</sub>= sampel 1

N<sub>2</sub>= sampel 2

R<sub>i</sub>= Ranking ukuran sampel

Berdasarkan t hitung dan t tabel maka dapat disimpulkan :

- Bila U hitung > U tabel maka terdapat perbedaan persepsi antara SMA Negeri 1 Sirombu dengan SMA Negeri 2 Mandrehe terhadap sekolah berwawasan lingkungan.
- Bila U hitung < U tabel maka tidak terdapat perbedaan persepsi antara SMA Negeri 1 Sirombu dengan SMA Negeri 2 Mandrehe terhadap sekolah berwawasan lingkungan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

##### a) Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan

Hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada warga sekolah tentang kebijakan berwawasan lingkungan di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe sebagai berikut :

Tabel 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

	SMA Negeri 1 Sirombu	SMA Negeri 2 Mandrehe
Valid		
Sangat Setuju	7	0
Setuju	55	0
Cukup Setuju	57	10
Kurang Setuju	6	91
Sangat Kurang Setuju	0	0
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>101</b>

Sumber : Data Olahan 2017

##### b) Kurikulum Berbasis Lingkungan

Hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada warga sekolah tentang

kurikulum berbasis lingkungan di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe sebagai berikut :

Tabel 2. Kurikulum Berbasis Lingkungan

		SMA Negeri 1 Sirombu	SMA Negeri 2 Mandrehe
Valid	Sangat Setuju	24	0
	Setuju	27	0
	Cukup Setuju	74	12
	Kurang Setuju	0	89
	Sangat Kurang Setuju	0	0
	<b>Total</b>	125	101

Sumber : Data Olahan 2017

- c) Kegiatan Berbasis Partisipatif** kegiatan lingkungan berbasis partisipatif di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe sebagai berikut :
- Hasil kuesioner yang telah disebarkepada warga sekolah tentang

Tabel 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

		SMAN 1 Sirombu	SMA N 2 Mandrehe
Valid	Sangat Setuju	34	0
	Setuju	20	0
	Cukup Setuju	56	12
	Kurang Setuju	15	84
	Sangat Kurang Setuju	0	5
	<b>Total</b>	125	101

Sumber : Data Olahan 2017

- d) Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah** Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe sebagai berikut :
- Hasil kuesioner yang telah disebarkepada warga sekolah SMA

Tabel 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah

		SMA Negeri 1 Sirombu	SMAN 2 Mandrehe
Valid	Sangat Setuju	48	38,4
	Setuju	21	16,8
	Cukup Setuju	41	32,8
	Kurang Setuju	15	12,0
	Sangat Kurang Setuju	0	0
	<b>Total</b>	125	100,0

Sumber : Data Olahan 2017

- e) Perbedaan Persepsi Warga Sekolah Antara SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe di Kabupaten Nias Barat**
- Untuk mengukur perbedaan persepsi warga sekolah antara SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe di Kabupaten Nias Barat dengan menggunakan uji beda dan diolah. Sebelum memulai uji beda, hal penting yang perlu diperhatikan yaitu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu sebagai prasyarat. Uji normalitas dan uji homogenitas perlu dilakukan untuk menentukan statistika yang akan digunakan dalam uji perbedaan.
- Uji beda pada penelitian ini menggunakan teknik statistik *Mann-Whitney U*. Hasil uji perbedaan data penelitian ditampilkan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Uji beda *Mann-Whitney U*

		Peringkat		
	Sekolah	N	Rata – rata peringkat	Jumlah peringkat
Persepsi Warga Sekolah	SMA Negeri 1 Sirombu	125	163,26	20407,00
	SMA Negeri 2 Mandrehe	101	61,88	6621,00
	Total	226		

Berdasarkan Tabel 5. di atas menunjukkan rata-rata peringkat tiap kelompok, yaitu pada kelompok kesatu

rata – rata peringkatnya 163,26 lebih besar dari pada rata – rata peringkat kedua, yaitu 61,88.

Tabel 6. Uji Statistik<sup>a</sup>

Uji Statistik <sup>a</sup>	
Persepsi Warga Sekolah	
Mann-Whitney U	843,000
Wilcoxon W	6621,000
Z	-12,214
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Variabel Kelompok : Sekolah

Berdasarkan Tabel 6. di atas menunjukkan nilai U sebesar 843 dan nilai W sebesar 6621. Apabila dikonversikan ke nilai Z maka besarnya -12,214. Nilai Sig atau P Value sebesar ,000 < 0,05. Apabila nilai p value < batas kritis 0,05 maka terdapat perbedaan persepsi bermakna antara SMA Negeri 1 Sirombu dengan SMA Negeri 2 Mandrehe.

**f) Upaya yang dapat dilakukan oleh stakeholder Pendidikan di Nias Barat dalam mengimplementasikan sekolah berwawasan lingkungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat maupun di Dinas Pendidikan di dapatkan informasi bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk produk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait dengan kegiatan Sekolah Berwawasan Lingkungan hingga saat ini masih belum ada. Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sekolah berwawasan lingkungan diantaranya adalah :

1. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat tersebut sehingga lebih diprioritaskan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat umum seperti kegiatan saat ini

sedang dalam penataan tempat pembuangan akhir.

2. Sumber daya manusia yang tersedia di kantor ini yang mempunyai ilmu khusus lingkungan hanya satu orang, kalau dilihat dari sumber daya manusia Kabupaten Nias Barat sangat minim sehingga program seperti ini kami belum bisa melaksanakannya.

**Pembahasan**

**a) Kebijakan Tentang Sekolah Berwawasan Lingkungan**

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, salah satunya dapat dimulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah. Oleh sebab itu pihak sekolah perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya berwawasan lingkungan hidup. Kebijakan berwawasan lingkungan terdiri atas komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (KLH 2014).

Mayoritas warga sekolah SMA Negeri 1 Sirombu menyatakan persepsetuju terhadap kebijakan tentang sekolah berwawasan lingkungan. Sekalipun SMA Negeri 1 Sirombu tidak memiliki kebijakan secara khusus yang dimuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk sekolah berwawasan lingkungan namun upaya yang dilakukan telah menuju sekolah berwawasan lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sirombu, beliau menyampaikan bahwa "Lingkungan sekolah harus dijaga keasriannya agar warga sekolah merasa nyaman dan betah untuk beraktifitas". SMA Negeri 1 Sirombu memang belum memiliki kebijakan yang dimuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (tenaga kependidikan dannon-kependidikan) di bidang pendidikan lingkungan hidup, kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam namun bukan berarti sekolah harus berdiam diri tanpa melakukan berbagai kegiatan.

Ada berbagai kebijakan yang dilakukan dan tidak termuat dalam RKAS seperti pengadaan tempat sampah (sampah kering, basah dan berbahaya), kegiatan pungut sampah sampai setelah apel selesai, kegiatan rutin bersih – bersih setiap hari jumat, pemeliharaan bunga didepan kelas dan piket kebersihan ruang kelas setiap hari agar tetap terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan indah.

Berbeda dengan SMA Negeri 2 Mandrehe, persepsi warga sekolah tentang kebijakan tentang sekolah berwawasan lingkungan masih dalam kategori kurang setuju. SMA Negeri 2 Mandrehe masih sangat jauh dalam melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam struktur kebijakan yang telah disusun.

SMA Negeri 2 Mandrehe juga belum memiliki kebijakan yang dimuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) namun dalam pengamatan kegiatan rutin seperti kegiatan jumat bersih hanya rutinitas, masih ada warga sekolah membuang sampah sembarangan bahkan tanpa rasa peduli dan membiarkan berserakan. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah ada berbagai kebijakan yang mereka ambil untuk lingkungan namun karena keterbatasan dana sehingga untuk

sementara belum bisa melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data hasil pengamatan, wawancara dan kuisioner SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe masih belum memiliki kebijakan tentang sekolah berwawasan lingkungan yang termuat dalam KTSP dan RKAS, kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (tenaga kependidikan dannon-kependidikan) di bidang pendidikan lingkungan hidup, kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam namun kedua sekolah memiliki persepsi yang berbeda dalam mengelola sekolah terutama dalam dana agar menjadi sekolah yang asri. SMA Negeri Sirombu melakukan berbagai kegiatan yang merupakan kontribusi bersama untuk melestarikan lingkungan sementara di SMA Negeri 2 Mandrehe memilih pasrah dengan keadaan ini.

Nugroho (2008) menyatakan Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

#### **b) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan**

Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan hidup sebagai strategi pembelajaran perlu dilakukan untuk membentuk sikap peduli lingkungan kalangan warga sekolah. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan sangat ditentukan oleh tenaga pendidik yang harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.

Mayoritas warga sekolah SMA Negeri 1 Sirombu menyatakan persepsi cukup setuju terhadap kurikulum berbasis lingkungan sedangkan responden di SMA Negeri 2 Mandrehe mayoritas menyatakan persepsi kurang setuju. Kedua sekolah memiliki masih belum menerapkan kurikulum berbasis lingkungan baik secara integratif maupun monolitik.

Kualifikasi tenaga pendidik masing – masing sekolah telah memenuhi standar

kualifikasi seorang tenaga pendidik yaitu minimal lulusan sarjana pendidikan, namun dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup masih rendah, sehingga diharapkan tenaga pendidik harus lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Upaya pengembangan isu lokal yang ada di wilayah sekitar masih belum optimal dilakukan oleh kedua sekolah bahkan isu global untuk lebih menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan pembelajaran lingkungan hidup baik secara integrasi maupun monolitik masih hanya diajarkan oleh guru – guru mata pelajaran tertentu saja. Materi ajar muatan lokal di kedua sekolah belum memasukkan materi tentang lingkungan sebagai bahan ajar.

Menurut Hamzah (2013), Pendidikan lingkungan sebagai pendidikan yang bersifat multidisiplin yang pembelajarannya dilaksanakan secara terintegratif, tentulah meminta seluruh kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang guru terpenuhi secara optimal. Sejalan dengan itu, maka seorang pendidik lingkungan hidup sudah seharusnya dilaksanakan oleh guru-guru yang sudah terlatih untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Seorang pendidik lingkungan tidaklah cukup hanya dengan latar belakang pendidikan guru yang telah dimilikinya semata.

Keating (1993) menyatakan bahwa pemerintah hendaknya menyediakan pendidikan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan bagi semua usia, pekerjaan lingkungan dalam konsep pembangunan, di dalamnya hendaknya memasukkan program pendidikan dengan persoalan utama lingkungan menganalisis berbagai penyebab krisis lingkungan, melibatkan peserta didik di sekolah dalam studi regional dan lokal terhadap kesehatan lingkungan, mencakup penyelamatan air minum, penjagaan kesehatan, makanan, lingkungan dan dampak penggunaan sumber daya ekonomi.

### **c) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif**

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif ditandai dengan pihak sekolah telah melaksanakan kegiatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah dan menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak diantaranya; masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain.

Mayoritas warga sekolah SMA Negeri 1 Sirombu menyatakan persepsi setuju terhadap kegiatan lingkungan berbasis partisipatif sedangkan responden di SMA Negeri 2 Mandrehe mayoritas menyatakan persepsi kurang setuju. Kedua sekolah memiliki kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yang dimuat dalam kegiatan dalam ekstrakurikuler atau kurikuler dan masih bersifat internal.

Pada lokasi penelitian ditemukan adanya sarana dan prasarana yang tidak terawat, lingkungan sekolah sebagian masih belum tertata rapi, bersih dan terurus. Bentuk kegiatan ekstra kurikuler/kurikuler yang sudah dilakukan hanya lomba kebersihan kelas dan dilaksanakan setiap akhir semester, kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar juga kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah masih belum terlaksana baik di SMA Negeri 1 Sirombu maupun SMA Negeri 2 Mandrehe.

Kegiatan seperti menanam pohon, daur ulang sampah, pemanfaatan air, karya seni dan hemat energi, dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah (orang tua, alumni, media/ pers, dunia usaha, pemerintah, LSM, Perguruan tinggi, sekolah lain) dan dinas pendidikan belum pernah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan keterlibatan warga sekolah antara lain berupa : piket kebersihan kelas, Jumat bersih dan lomba kebersihan kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran warga sekolah untuk terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah harus lebih ditingkatkan.

Slamet (2004) menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut saya masalah rendahnya partisipasi baik pihak

sekolah dan pihak luar sekolah terhadap sekolah berwawasan lingkungan karena kurangnya kesadaran dan tidak memiliki rasa tanggung jawab bersama sehingga upaya untuk melestarikan alam hanya dilakukan orang yang peduli saja.

#### **d) Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah**

Upaya untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan perlu didukung sarana dan prasarana yang mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan hidup, antara lain indikator: ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.

Mayoritas warga sekolah SMA Negeri 1 Sirombu menyatakan persepsi setuju terhadap pengelolaan sarana pendukung sekolah sedangkan responden di SMA Negeri 2 Mandrehe mayoritas menyatakan persepsi kurang setuju. Pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar kawasan sekolah, penghematan sumberdaya alam (air, listrik) dan ATK. peningkatan kualitas pelayanan makan sehat dan pengembangan sistem pengelolaan sampah masih belum diterapkan di kedua sekolah.

Di setiap sekolah ketersediaan air sangatlah sulit karena hanya mengharapkan air tampungan dari hujan, pada saat musim kemarau sangat terasa. Demikian pula halnya dengan pola listrik, alat tulis, plastik dan barang keperluan lainnya khususnya barang dengan sifat sekali pakai tidak digunakan secara hemat.

Pihak sekolah masih kurang melakukan sosialisasi tentang penghematan pemakaian listrik, air dan ATK secara efisien. Hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, masih ditemukan listrik yang menyala disiang hari, ATK digunakan secara boros, kantin sekolah telah melakukan pelayanan belum yang sehat dan ramah lingkungan. Kantin menjual makanan/minuman yang mengandung bahan pengawet/pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan kantin tidak menjual makanan yang dikemas

tidak ramah lingkungan, seperti : plastik, styrofoam, aluminium foil.

Sesuai dengan hasil wawancara dan fakta dilapangan sarana prasarana masih jauh standar sarana dan prasarana Permendiknas No 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase dan ruang terbuka hijau.

Menurut Engkoswara dan Aan (2011), bahwa sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan kemudahan-kemudahan baik bagi siswa, guru maupun bagi tenaga kependidikan lainnya yang berupa gedung, atau ruangan kelas, perumahan guru, penjaga sekolah dan gedung laboratorium.

#### **4. Hambatan Implementasi Sekolah Berwawasan Lingkungan**

Setelah melakukan penelitian, pengamatan dan wawancara, adapun hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya kesadaran warga sekolah terkait pentingnya lingkungan hidup dan belum menerapkan secara optimal pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi di semua mata pelajaran. Dilain pihak ada sekelompok warga sekolah yang masih belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan masih ada sekelompok warga sekolah yang masih menganggap sok terhadap perbuatan yang sifatnya melestarikan lingkungan hijau.
- b) Belum ada pengalokasian dana kegiatan sekolah berwawasan lingkungan yang dimuat dalam APBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- c) Dukungan masyarakat dan instansi lain yang masih rendah. Pada dasarnya program sekolah berwawasan lingkungan tidak ditujukan sebagai suatu kompetisi atau lomba. Penghargaan sekolah berwawasan lingkungan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan

pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pelaksanaan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, warga sekolah perlu dilibatkan dalam berbagai aktivitas pembelajaran lingkungan hidup.

lingkungan menentukan beberapa kebijakan sebagai payung hukum yang kuat dalam menjalankan program sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Dari dua sekolah yang diteliti, adapun kegiatan/program yang berwawasan lingkungan seperti terlihat pada Tabel 7. berikut :

### 5. Analisis Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan tentang sekolah berwawasan

Tabel 7. Indikator kegiatan sekolah

No	Indikator	SMAN 1 Sirombu	SMAN 2 Mandrehe
01	Kebijakan sekolah	Tidak ada kebijakan khusus untuk sekolah berwawasan lingkungan yang dimuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah.	Tidak ada kebijakan khusus untuk sekolah berwawasan lingkungan yang dimuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah.
02	Pelaksanaan Kurikulum	Pendidikan Lingkungan Hidup belum menjadi satu mata pelajaran masih hanya diajarkan oleh guru yang ada materi tentang lingkungan sehingga belum terlaksana secara integrasi maupun monolitik.	Pendidikan Lingkungan Hidup belum menjadi satu mata pelajaran masih hanya diajarkan oleh guru yang ada materi tentang lingkungan sehingga belum terlaksana secara integrasi maupun monolitik.
03	Kegiatan berbasis partisipatif	Kegiatan 7 K dilaksanakan setiap hari Jumat, Lomba kebersihan kelas sekali dalam 6 bulan, Petugas setiap hari secara terjadwal melaksanakan pengumutan sampah, penanaman pohon dilakukan oleh guru dan siswa yang bersifat kegiatan sukarela.	Kegiatan 8 K dilaksanakan setiap hari Jumat, Lomba kebersihan kelas sekali dalam 6 bulan, Petugas setiap hari secara terjadwal melaksanakan pengumutan sampah, penanaman pohon sekali dalam setahun yang diprogram oleh OSIS.
04	Sarana dan prasarana	Rombel : 15 ruang Kasek : 1 ruang Guru : 1 ruang BK : 1 ruang TU : 1 ruang Bendahara : 1 ruang Lab : 3 ruang Perpustakaan : 1 ruang Kantin : 2 tempat CCTV : Tiap ruang Tong sampah : Tiap ruang	Rombel : 12 ruang Kasek : 1 ruang Wakasek : 1 ruang Osis : 1 ruang TU : 1 ruang Lab : 1 ruang Perpustakaan : 1 ruang Kantin : 4 tempat Tong sampah : Tiap ruang

Dari segi kebijakan tentang sekolah berwawasan lingkungan masing – masing

sekolah belum memiliki kebijakan yang terprogram dalam KTSP dan RKAS.



Namun di SMA Negeri 1 Sirombu melakukan berbagai kegiatan berwawasan lingkungan karena memiliki kultur melestarikan lingkungan.

SMA Negeri 1 Sirombu banyak mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui pengadaan fasilitas – fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar seperti meja dan kursi, juga telah membentuk sanggar budaya yang merupakan salah satu kegiatan untuk mempromosikan kearifan lokal seperti tempat sirih yang telah dianyam dan memakai bahan – bahan lokal yang bebas dari bahan plastik.

Salah satu tradisi Ono Niha (orang Nias) yang masih hidup dan tetap dipertahankan sampai sekarang yaitu *Bolanafo*. *Bolanafo*, terdiri dari dua suku kata yaitu *bola* dan *afo*. *Bola* identik dengan pengertian tempat, sedangkan *afo* adalah lima ramuan dari *tawuo* (daun sirih), *betua* (kapur), *gambe* (daun gambir), *bago* (tembakau), dan *fino* (buah pinang). Bahan baku anyaman *bolanafo* terbuat dari sejenis rumput rawa-rawa *Keleömö* (*Eleocharis dulcis*) yang dikeringkan dan dipipihkan, lalu diberi pewarna dan dianyam. Bola Nafu bukan sekedar kantong sirih melainkan benda yang dinilai penting bagi tradisi komunal masyarakat Nias.

Hasil penelitian Suryadi E (2010) menyatakan bahwa kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang lain, yaitu bawahan untuk melaksanakan secara langsung tugas-tugas, disamping memerlukan sarana dan prasarana lainnya. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasional.

Kinerja pegawai merupakan hasil dari suatu proses atau seperangkat proses yang menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai (dan bagaimana hal itu dicapai) serta bagaimana dapat mengatur orang dengan cara yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan tersebut. Kinerja pegawai yang tinggi bisa tercapai apabila didukung dengan adanya

*leadership* dan budaya organisasi yang baik pula.

Untuk menciptakan kondisi sekolah yang berwawasan lingkungan dibutuhkan *leadership* yang kuat dan berinovasi sehingga mampu melakukan terobosan/karya dalam sebuah organisasi. *Leadership* mampu menggerakkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap bawahannya memelihara lingkungan dan akan menjadi budaya yang baik bagi organisasi maupun lembaga. Dalam kasus ini SMA Negeri 1 Sirombu memiliki *leadership* yang lebih baik dalam mengelola sekolah sehingga menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi persepsi warga sekolah terhadap sekolah berwawasan lingkungan.

Hasil penelitian Ramdhani (2013), Implementasi sekolah yang berwawasan lingkungan dan berbudaya lingkungan dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah termasuk pimpinan sekolah, guru, karyawan, peserta didik dan penjaga sekolah. Sekolah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan guna mewujudkan sekolah yang peduli lingkungan. Kerjasama yang baik di antara semua pihak dan komitmen yang jelas di antara semua warga sekolah maka keempat indikator yang menjadi ciri sekolah yang berwawasan lingkungan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Program Adiwiyata perlu diterapkan di sekolah-sekolah untuk membentuk perilaku peduli terhadap lingkungan bagi warga sekolah.

#### **6. Analisis Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Stakeholder Dinas Terkait Dalam Mengimplementasikan Sekolah Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Nias Barat.**

Penyelesaian masalah dan krisis lingkungan yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi justru yang terpenting adalah melalui pendekatan pendidikan moral. Membangun moral yang baik akan menjadi modal utama bagi manusia untuk berperilaku etis dalam mengatur hubungan antara dirinya dengan alam semesta. Sehubungan dengan itu

penyelesaian masalah dan krisis lingkungan tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun diperlukan kerjasama multipihak secara serentak dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Faktor pendukung dalam penerapan kegiatan sekolah berwawasan lingkungan adalah dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah dalam penyelenggaraannya, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, seperti adanya program dan perencanaan yang sistematis, tersedianya basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli, terampil, sarana serta dana yang memadai dan kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *stakeholder* baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa sampai saat ini belum memiliki payung hukum tentang kegiatan sekolah berwawasan lingkungan sehingga kegiatan tersebut belum bisa diterapkan. Minimnya anggaran yang dikelola oleh dinas terkait juga keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola menjadi kendala yang dihadapi dalam menerapkan kegiatan sekolah berwawasan lingkungan.

Peran pemerintah dalam menyukseskan program sekolah berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

#### 1. Peran Pembinaan

Dalam menyelenggarakan program sekolah berwawasan lingkungan Pemerintah berperan dalam pembinaan sekolah yang meliputi : melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan sekolah model atau percontohan, pendampingan/monitoring dan evaluasi program.

#### 2. Peran Penilaian

Program dari sekolah – sekolah yang mencanangkan program

pendidikan lingkungan di sekolah akan dinilai oleh Pemerintah yang diajukan sebagai penerima program Adiwiyata dan dilakukan secara berjenjang yaitu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Penilaian terhadap sekolah sekolah berwawasan lingkungan meliputi 4 aspek penilaian yaitu aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

#### 3. Pemberian Penghargaan

Ada beberapa penghargaan dalam program Adiwiyata. Penghargaan Adiwiyata terbagi dalam 3 kategori yaitu Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Calon Adiwiyata. Adiwiyata Mandiri diberikan kepada sekolah–sekolah yang mampu mempertahankan program–program lingkungan hidup mereka selama tiga tahun berturut–turut. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan diatas, penghargaan adiwiyata tahapan pemberdayaan (selama kurun waktu kurang dari 3 tahun) dan tahap kemandirian (selama kurun waktu lebih dari 3 tahun).

Pada tahap awal, penghargaan Adiwiyata dibedakan atas dua kategori, yaitu :

- Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup.
- Calon sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang dinilai telah berhasil dalam pengembangan lingkungan hidup.

#### 7. Kesimpulan

1. Persepsi warga sekolah antara SMA Negeri 1 Sirombuleh lebih baik dibandingkan dengan SMA Negeri 2 Mandrehe terhadap sekolah berwawasan lingkungan.
2. Belum ada upaya/tindakan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidupterkait dengan sekolah berwawasan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alamendah.2014. Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya. diaksesmelalui <https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>[02 Oktober 2016]
- Bapedalda Provinsi Sumatera Utara.2002. Pola Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara. Medan
- Daryanto dan A. Suprihatin. 2013. Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta. Gava Media.
- [Depdiknas] Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa IndonesiaPusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ellen, L. 2014. Implementasi Kebijakan Sekolah berwawasan lingkungan Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *ejournal.umm.* 2 : 82 – 88.
- Engkoswara dan A. Komariah.2011. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Hamzah, S.2013. Pendidikan Lingkungan. Penerbit Refika Aditama. Bandung
- Hasanah, N. 2011. Implementasi Program Green School Pada Pembelajaran IPS di SMPN 9 dan 15 Tegal. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hidayati, N., T. Taruna dan H. Purnaweni. 2013.Perilaku Warga Sekolah Dalam Mengimplementasikan Program Sekolah berwawasan lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Semarang : Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana.
- Indrawan, R.dan P. Yaniawati. 2014. Metodologi Penelitian. PT Refika Aditama. Bandung
- Karmanto, E. dkk. 2015. Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Pada Sekolah Sekolah berwawasan lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik.* 2 : 1981 – 1985. Malang.
- Keating, C. J.1993. Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya. Kanisius, Yogyakarta.
- [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2016. Panduan Sekolah berwawasan lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- KLH. 2015. Sarasehan Sekolah berwawasan lingkungan Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- KLH. 2013. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah berwawasan lingkungan. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup.
- KLH. 2009. Pendidikan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- KLH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup.
- [Kemdikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMA Negeri 1 Sirombu. <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/52F06827F5955D8A1366> [20 November 2016]

- Kemdikbud. 2016. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMA Negeri 2 Mandrehe. <http://dapo.dikdasmen.ke mdikbud.go.id/sekolah/CF079F777 D7C307CDB99> [20 November 2016].
- Kemdikbud. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RINo. 23 Tahun 2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Kemdikbud. 2003. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Kulsum, U.dan M. Jauhar.2014. Pengantar Psikologi sosial. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Manurung, Y. 2011. Program Sekolah berwawasan lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah (Studi Kasus SDN Panggung 04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah).[Tesis]Sumber: <http://eprints.undip.ac.id/31463/>[01 Oktober 2016].
- Muluk, C. dan R.Setiawan. 2016. Aplikasi Statistik. Bandung. Sinergi Mandiri
- Muchlas, M. 2008. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Mukminin, A. 2014. Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Sekolah berwawasan lingkungan Mandiri. TA'DIB.19 : 227 – 252. Jambi
- Mulyana, R. 2009. Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan. Tabularasa PPS UNIMED. 6 : 175 – 180.
- Mulyasa, E. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nugroho, R. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan–Analisis Kebijakan–Proses. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Panggabean, R. 2016. Implementasi Kebijakan Program Sekolah berwawasan lingkungan Nasional di SMA Negeri 1 Silahisabungan dan SMA Negeri 2 Sidikalang Kabupaten Dairi. [Tesis]. Program Pascasarjana PSL Universitas Sumatera Utara.
- [PPLH] Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. 2013. Pendidikan Lingkungan Hidup. Universitas Negeri Medan. Medan.
- Rahmah, Y. dkk. 2014. Implementasi Program Sekolah Sekolah berwawasan lingkungan (Studi pada SDN Manukan Kulon III/540 Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik (JAP). 2 : 753-757. Malang
- Ramdhani, R. 2013. Implementasi Program Adiwiyata dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah di SMPN 3 sukabumi. [Tesis]. SPS UPI. Bandung
- Saragih, A.A. 2012. Pengaruh Program Sekolah berwawasan lingkungan Terhadap Kognitif Afektif dan Psikomotorik Lingkungan Hidup Siswa Sekolah Dasar di Kota Medan (Studi Kasus di SD Swasta Pertiwi dan SD Negeri 060843 Kec. Medan Barat).[Tesis]. Program Pasca Sarjana PSL Universitas Sumatera Utara.
- Sarwono, S.W. 1992. Psikologi Lingkungan. PT. Grasindo. Jakarta
- Saputro, R. dan D. Liesnoor. 2015. Implementasi Program Sekolah berwawasan lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sekolah Di SMA Negeri 1 Jekulo Kudus. Journal.unnes. 6 : 44 – 53

- Shamadi, Y. 2012. Kajian tentang Penerapan Sekolah Berwawasan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sekolah berwawasan lingkungan Nasional Pada SMA Negeri di Kabupaten Batu Bara.[Tesis]. Program Pascasarjana PSL Universitas Sumatera Utara.
- Slamet, J.S. 2004. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sumitro, dkk. 2005. Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta : UNY.
- Suryadi, E. 2010. Analisis peranan leadership dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. SPS UPI. Bandung. 8 : 1 – 9
- Sutondo, A. 2010. Peduli Pendidikan "<http://agussutondopedulipendidikan.blogspot.com/2010/12/kelasunggulan-si-pintar-atau-si-kaya.html>".[2 November 2016].
- Syahdian. 2000. Hubungan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan Partisipasi Siswa SMA Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi. [Tesis]. Program Pascasarjana PSL Universitas Sumatera Utara.
- Tjitono, F. 2000. Manajemen Jasa. Yogyakarta. Andi Offset.
- [USU] Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. 2012. Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi. SPs. USU. Medan.
- Walgito, B. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta. Andi Offset
- Yahya, S. 2012. Kajian Tentang Penerapan Sekolah Berwawasan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sekolah berwawasan lingkungan Nasional Pada SMA Negeri Di Kabupaten Batubara. [Tesis]. Program Pascasarjana PSL Universitas Sumatera Utara.
- Yusuf, Y. 1991. Psikologi Antar Budaya. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya